

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Pada Dasarnya Merupakan Suatu Sistem Yang Dibentuk Untuk Mengatur Kehidupan Masyarakat Melalui Kebijakan, Program, Serta Tindakan Yang Terorganisir Dan Berlandaskan Hukum (Masnun, 2024). Pemerintah Memiliki Peran Penting Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik, Menjaga Stabilitas Sosial, Serta Mendorong Pembangunan Nasional (Fatiya Diana Wulandari Putri Et Al., 2023). Dalam Konteks Pemerintahan Modern, Pemerintah Tidak Lagi Terbatas Hanya Pada Pemegang Kekuasaan Administratif, Tetapi Juga Mencakup Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Dituntut Untuk Mampu Menjalankan Tugasnya Secara Efektif, Efisien, Dan Responsif Terhadap Kebutuhan Publik Yang Terus Berkembang.

Namun Dalam Praktiknya, Penyelenggaraan Pemerintahan Sering Kali Dihadapkan Pada Berbagai Permasalahan Yang Menghambat Tercapainya Tujuan Tersebut. Masih Ditemui Adanya Birokrasi Yang Kurang Efektif, Prosedur Yang Berbelit-Belit, Serta Praktik Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Yang Berdampak Pada Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik (Alshadiqa Et Al., 2025). Kondisi Ini Menyebabkan Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Serta Munculnya Kesenjangan Antara Harapan Publik Dengan Kinerja Pemerintah Yang Belum Optimal.

Sebagai Respon Terhadap Berbagai Permasalahan Tersebut, Konsep Good Governance Berkembang Sebagai Pendekatan Dalam Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (Suriadi, 2025). Good Governance Menekankan Pentingnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan,

Akuntabel, Partisipatif, Serta Berorientasi Pada Efektivitas Dan Efisiensi (Bunka Rahmawati & Baharudin Zubakhrum Tjenreng, 2025). Konsep Ini Menjadi Penting Karena Tidak Hanya Menilai Hasil Kebijakan, Tetapi Juga Proses Bagaimana Kebijakan Tersebut Dirumuskan Dan Dilaksanakan. Dengan Demikian, Good Governance Menjadi Indikator Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Kepentingan Masyarakat.

Penerapan Good Governance Juga Didukung Oleh Berbagai Regulasi Di Indonesia, Salah Satunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Yang Menekankan Pentingnya Kualitas Pelayanan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat (Putri, 2025). Selain Itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Juga Menjadi Landasan Dalam Mendorong Terciptanya Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel (Khairul Hamdi.R, 2024). Regulasi Tersebut Menunjukkan Bahwa Penerapan Good Governance Bukan Hanya Kebutuhan Konseptual, Tetapi Juga Menjadi Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam Konteks Pemerintahan Daerah, Penerapan Good Governance Menjadi Semakin Penting Karena Pemerintah Daerah Merupakan Ujung Tombak Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan Dalam Mengelola Berbagai Urusan Pemerintahan Yang Bersifat Strategis Dan Bersentuhan Langsung Dengan Masyarakat (Lobubun Et Al., 2022). Oleh Karena Itu, Kualitas Tata Kelola Di

Tingkat Daerah Sangat Menentukan Keberhasilan Program-Program Pemerintah Serta Terciptanya Stabilitas Sosial Di Masyarakat.

Salah Satu Bentuk Kebijakan Pemerintah Yang Memerlukan Tata Kelola Yang Baik Adalah Program Bela Negara. Program Ini Memiliki Peran Strategis Dalam Membentuk Sikap Nasionalisme, Kedisiplinan, Serta Kecintaan Terhadap Tanah Air Pada Generasi Muda. Bela Negara Tidak Hanya Dipahami Sebagai Upaya Pertahanan Secara Militer, Tetapi Juga Sebagai Bentuk Kesadaran Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan Dan Keutuhan Bangsa Di Tengah Berbagai Tantangan Sosial Yang Berkembang (Harun, 2025).

Dalam Implementasinya, Program Bela Negara Di Tingkat Daerah Salah Satunya Diwujudkan Melalui Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Program Ini Tidak Hanya Diarahkan Pada Pelaksanaan Upacara Kenegaraan, Akan Tetapi Sebagai Sarana Pengembangan Karakter Generasi Muda Melalui Pelatihan Disiplin, Kepemimpinan, Serta Penanaman Nilai Kebangsaan (Karsono, 2024). Paskibraka Menjadi Wadah Bagi Generasi Muda Untuk Menginternalisasi Nilai Bela Negara Secara Nyata Melalui Proses Pembinaan Yang Terstruktur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Memiliki Peran Strategis Sebagai Penanggung Jawab Utama Dalam Pembinaan Paskibraka Di Daerah (PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2022). Peran Tersebut Mencakup Proses Seleksi, Pembinaan, Hingga Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dalam Pelaksanaannya, Bakesbangpol Juga

Bekerja Sama Dengan Berbagai Pihak, Seperti TNI Dan Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Sehingga Program Ini Tidak Hanya Bersifat Seremonial, Tetapi Juga Menjadi Bagian Dari Upaya Pembinaan Ideologi Dan Ketahanan Nasional Di Tingkat Daerah (Zahra & Ananta Prathama, 2025).

Namun Demikian, Keberhasilan Program Paskibraka Tidak Hanya Ditentukan Oleh Pelaksanaan Kegiatan Semata, Tetapi Juga Oleh Kualitas Tata Kelola Yang Mendasarinya. Dalam Hal Ini, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Menjadi Aspek Penting Dalam Menilai Bagaimana Program Tersebut Direncanakan, Dilaksanakan, Dan Dievaluasi. Oleh Karena Itu, Penelitian Ini Berfokus Pada Analisis Implementasi Good Governance Pada Bakesbangpol Dalam Program Bela Negara Paskibra Kota Mojokerto Tahun 2025, Guna Mengetahui Sejauh Mana Prinsip-Prinsip Tersebut Telah Diterapkan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto Dalam Program Bela Negara Paskibraka Tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Dan Mendeskripsikan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto Dalam Pelaksanaan Program Bela Negara Paskibraka Tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Implementasi Konsep *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Program Pemerintah Di Tingkat Daerah .Penelitian Ini Turut Memperluas Pembahasan Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Yang Mencakup Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Responsivitas, Supremasi Hukum, Serta Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pelaksanaan Program Bela Negara Melalui Kegiatan Paskibraka.

Selain Itu, Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Digunakan Sebagai Rujukan Akademik Untuk Memahami Keterkaitan Antara Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Penerapan Program Penguatan Ideologi Dan Nilai-Nilai Nasionalisme Di Kalangan Generasi Muda. Dengan Demikian, Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Sebagai Bahan Rujukan Bagi Pengembangan Penelitian Selanjutnya Yang Memiliki Fokus Serupa, Baik Dalam Kajian *Good Governance* Maupun Program Bela Negara Di Tingkat Kabupaten Atau Kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pada Bakesbangpol Kota Mojokerto Kajian Ini Diharapkan Mampu Menjadi Bahan Evaluasi Untuk Terus Mendorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Program Bela Negara Melalui Kegiatan

Paskibraka, Khususnya Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

2. Bagi Pemerintah Daerah Hasil Penelitian Ini Dapat Dimanfaatkan Sebagai Referensi Dalam Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Yang Lebih Optimal Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Generasi Muda Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan.
3. Bagi Masyarakat Dan Peserta Paskibraka Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Pemahaman Mengenai Pentingnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Program Bela Negara, Sehingga Mendorong Partisipasi Dan Kesadaran Masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian Ini Dapat Menjadi Bahan Rujukan Dan Perbandingan Dalam Pengembangan Penelitian Yang Berkaitan Dengan Implementasi Good Governance Maupun Program Bela Negara Di Berbagai Daerah.